

Pertumbuhan PDRB dan Dampaknya terhadap Lapangan Pekerjaan, Tingkat Kemiskinan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Banten

Oleh : Usman Mulyadi

(Universitas Teknologi Nusantara, Serang Banten)

ABSTRACT

Banten is offerings a province in 2011, ad a growth rate reached the level of 6,52 percent economy. Mean while the national inflation rate 6,1 percent. At the province number of poor is also compared to the new provinces the division based on data 2011 shows that the number of poor is relatively low at the province offerings amounting to 6,25 percent the provinces unemployment percentage is slight above the DKI Jakarta province. Amounting to 10,74 percent. When reffering to the high reveence. Growth should be accompanied by a decrease in the level of poor people and increase employment.

The purpose of this study was to determine and analyze the factors that influence economic growth both regional and sectoral Banten Province and impact on the level of poor and providing of employment for Banten's human being.

This study uses secondary data in the past 10 years. In the fact were collected from the central bureu of statistics, National Planing and data from Banten Province. Model Analysis is multiple regression analysis with three regression model structure. Economic growth can be calculate from the production approach, expenditure approach and income approach. This study used the approach which consist of consumption expenditure of household, spending agencies, government spending, change in stock, investment and net export.

The result showed that household consumption is very influential on regional economic growth and regional sectoral offerings. In addition the province's economic growth is influenced also by the offerings of investment and net export, while the other factors studied no real effect. Therefore, increasing peoples purchasing power is crucial for economic growth Banten province. Besides investment and net export also affect imports for the province's economic growth so it needs to be improved offerings. Further offerings provincial revenue growth appear to have a direct impact on poverty reduction efferts, welfare, increased employment, and ultimately affect the level of social, while in the review of the most income is dominant sector in the raising people province offering and management of industrial sectors, consumption expenditure of households, spending agencies, government spending, change in stocks, investment, net exsport, economic growth, employment, poverty, and social welfare.

Key Words :

Growth in Gross Regional Domestic Product, household consumption, consuntion institutions, government consuntion, gross fixed capital, change in stock, net exports, economic growth, employment, poverty, social welfare.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah hal penting yang ingin dicapai dalam suatu proses pembangunan ekonomi. Kegiatan pembangunan secara nasional tidak terlepas dari peran seluruh Pemerintah Daerah yang telah berhasil memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing. Terlebih dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah Provinsi harus bisa mengoptimalkan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki. Pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari perkembangan kesejahteraan

masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB). Banyak faktor yang mempengaruhi perubahan pada tingkat pertumbuhan diantaranya adalah tingkat konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten. Provinsi Banten sampai saat ini memiliki 8 Kabupaten/Kota.

Tingkat PDRB di wilayah Banten pada saat sebelum dan sesudah pemekaran adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha

Sebelum Otonomi daerah.

Sebelum Pemekaran					
No.	Kabupaten	1996	1997	1998	1999
1	Pandeglang	1,051,552.90	1,086,227.42	1,001,611.67	1,079,958.65
2	Lebak	985,020.99	1,007,560.56	907,808.51	930,882.81
3	Tangerang	4,043,728.63	4,284,215.22	3,887,337.49	3,969,481.31
4	Serang	5,419,277.86	5,653,568.23	4,838,098.00	4,876,679.00
	Kota				
1	Tangerang	6,144,189.22	6,823,921.80	5,680,177.00	5,828,430.00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 1996-1999

Dari tabel 1 terlihat kabupaten-kabupaten dan kota yang sekarang menjadi Provinsi Banten masih berada dalam wilayah Provinsi Jawa barat dengan menghasilkan PDRB yang tinggi. Sebelumnya yang termasuk dalam wilayah Provinsi Banten adalah (1) Kabupaten Pandeglang, (2) Kabupaten Lebak, (3) Kabupaten Tangerang, (4) Kabupaten Serang, (5) Kota Tangerang.

Sejak dilakukannya pemekaran, pada tahun 2000-2002, seluruh sektor-sektor ekonomi Provinsi Banten memiliki pertumbuhan yang cepat, sehingga termasuk dalam kelompok pertumbuhan yang *progresif*. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang pertumbuhannya relatif lambat (Citra, 2006). Seperti terlihat pada data berikut mengenai PDRB Propinsi Banten setelah dilakukannya pemekaran wilayah dan otonomi dan pemekaran adalah sebagai berikut :

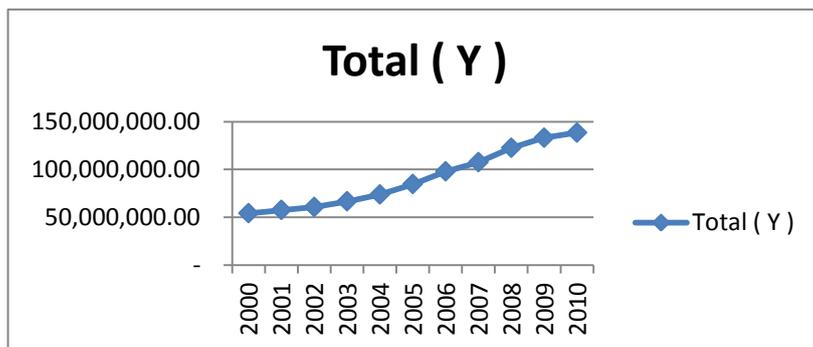
Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Banten Atas Dasar Harga Konstan 1993 Menurut Lapangan Usaha sesudah Otonomi daerah.

Kab/Kota	2000	2001	2002	2003	2004
Pandeglang	2,673,330.84	2,779,131.04	2,919,599.34	3,052,872.34	3,211,069.95
Lebak	2,715,292.10	2,848,261.94	2,943,833.77	3,046,905.45	3,170,530.64
Kab. Tanggerang	12,343,040.53	12,981,780.55	13,573,715.93	14,175,744.76	15,083,123.26
Serang	6,577,647.37	6,781,749.99	7,020,647.75	7,317,283.70	7,638,401.10
Kota Tanggerang	16,398,793.98	16,965,462.86	17,984,150.35	19,224,895.88	20,332,135.35
Kota Cilegon	6,654,617.00	7,208,186.57	7,720,263.47	8,281,367.51	8,886,737.29
Provinsi Banten	45,690,559.04	47,495,383.36	49,449,321.34	51,957,457.73	54,880,406.50

Sumber : Banten dalam Angka 2005

Adapun tingkat PDRB Provinsi Banten ekonomi selama kurun waktu 2000 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut :

Grafik 1.1. Tingkat PDRB Provinsi Banten



Sumber : BPS 2011

Dari grafik diatas terlihat bahwa selama kurun waktu tersebut, pendapatan nasional (PDRB) di Provinsi Banten terus mengalami kenaikan.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah menurut Adi widodo (dalam Hermanto Siregar, 2009) dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Jika tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat, pada gilirannya penduduk miskin menjadi semakin berkurang baik dari segi jumlah maupun kualitas. Perbandingan persentase penduduk miskin di Provinsi Banten diantara Provinsi-Provinsi baru lain hasil pemekaran berdasarkan data tahun 2011 terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten relatif rendah yaitu sebesar 6,25 persen. Menurut Hermanto Siregar (2009) implikasi dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas antara lain adalah berkembangnya lapangan pekerjaan, sehingga laju pengangguran serta insiden kemiskinan dengan sendirinya berkurang. Hal ini terlihat bertentangan dengan kondisi yang muncul di Provinsi Banten.

Perekonomian Banten pada triwulan I 2011 bertumbuh sebesar 6,52% yang meningkat cukup signifikan atau mencapai level pertumbuhan tertinggi sejak Provinsi Banten berdiri. Kondisi yang terjadi di Banten : disisi konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga, konsumsi pemerintah, modal tetap brutto, inventory stock dan ekspor impor dalam rentang waktu 2000-2010 sangat berfluktuasi. Begitupula halnya dengan seluruh sektor pembangunan di Provinsi Banten sangat berfluktuasi, dengan pergerakan tercepat berada pada sektor industri pengolahan, dan sektor yang perkembangannya paling lamban adalah pertambangan dan penggalian.

Pergerakan peningkatan lapangan pekerjaan yang tersedia di Provinsi Banten terus mengalami

Kondisi tingkat Pengangguran di Provinsi Banten Jika mengacu pada Pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I 2011 yang mencapai level 6,52%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional pada level 6,50% . Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah merupakan faktor yang penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menurunkan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun belum signifikan, perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten terus meningkat yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal yang menarik untuk diteliti bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dalam kaitannya dengan usaha pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dimana semua ini tidak terlepas dengan sektor-sektor ekonomi yang ada di Provinsi ini.

peningkatan, walaupun laju perubahannya relatif lambat. Sedangkan perubahan jumlah penduduk miskin di Provinsi ini seiring dengan pembangunan, mulai tahun 2006 sampai dengan 2010 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. indek Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten selama kurun waktu 2000-2012 terus mengalami kenaikan, kenaikan yang cepat terjadi dari tahun 2000 sampai dengan 2005, mulai tahun 2005 sampai dengan 2010 terlihat peningkatannya melambat. Adapun pergerakan PDRB, lapangan pekerjaan, tingkat kemiskinan dan IPM terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3. Tingkat PDRB, Kemiskinan, Pengangguran, dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Banten

Tahun	PDRB	Lapangan Pekerjaan	Tingkat Kemiskinan	IPM
2000	54,127,011.02	2,790,353	1,184,100	63,8
2001	57,581,926.61	2,889,411	1,029,779	65,3
2002	60,612,554.33	3,217,192	786,700	66,6
2003	66,575,296.75	3,181,976	855,800	67,2
2004	73,713,784.41	3,289,823	779,200	67,9
2005	84,622,287.98	3,314,836	830,500	68,8
2006	97,867,273.39	3,235,808	904,300	69,1
2007	07,499,652.43	3,338,805	886,200	69,30
2008	122,490,654.25	3,668,895	816,742	69,70
2009	133,048,007.11	3,704,778	788,067	70,06
2010	138,369,927.39	4,583,085	758,163	70,10

Sumber : BPS 2011

RUMUSAN MASALAH

1. Bagai manakah pengaruh variabel pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran lembaga, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, *Inventori / Stok*, dan Ekspor Neto terhadap Pertumbuhan Ekonomi Banten (PDRB) secara simultan dan parsial?
2. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Banten terhadap lapangan pekerjaan ?
3. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Banten terhadap tingkat kemiskinan ?
4. Bagaimanakah pengaruh lapangan kerja dan tingkat kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat ?
5. Bagaimanakah pengaruh secara simultan dan parsial dari variabel konsumsi rumah tangga, pengeluaran lembaga, Pengeluaran Pemerintah, Investasi, *Inventori / Stok*, dan Ekspor Neto terhadap Pertumbuhan masing-masing sektor perekonomian ?
6. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan sektoral terhadap lapangan pekerjaan?
7. Bagaimanakah pengaruh pertumbuhan sektoral terhadap tingkat kemiskinan ?

BAHAN DAN METODE

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Hermanto siregar (2009:145) adalah laju perubahan Produk domestik Brutto (PDB) yang merupakan besaran “kue pembangunan ekonomi” pada suatu titik waktu

Berdasarkan Gambar 2.1 diatas, ada empat komponen PDB yaitu:

tertentu. Menurut Todaro (2006,92) Ada 3 komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu : *pertama*, akumulasi kapital yang terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. *Kedua*, pertumbuhan penduduk yang akan mendorong pertumbuhan jumlah angkatan kerja. *Ketiga*, kemajuan teknologi yaitu ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional.

N. Gregory Mankiw (2009 : 45) menyatakan bahwa variabel makro ekonomi yang paling penting adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB untuk mengukur total barang dan jasa dan pendapatan total suatu negara.

Gambar 2.1. lebih akurat mencerminkan bagaimana fungsi riil

Sumber : N. Gregory Mankiw (2009)

ekonomi. Ini menunjukkan keterkaitan antara pelaku ekonomi rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah dan bagaimana uang mengalir di antara mereka melalui berbagai pasar dalam perekonomian

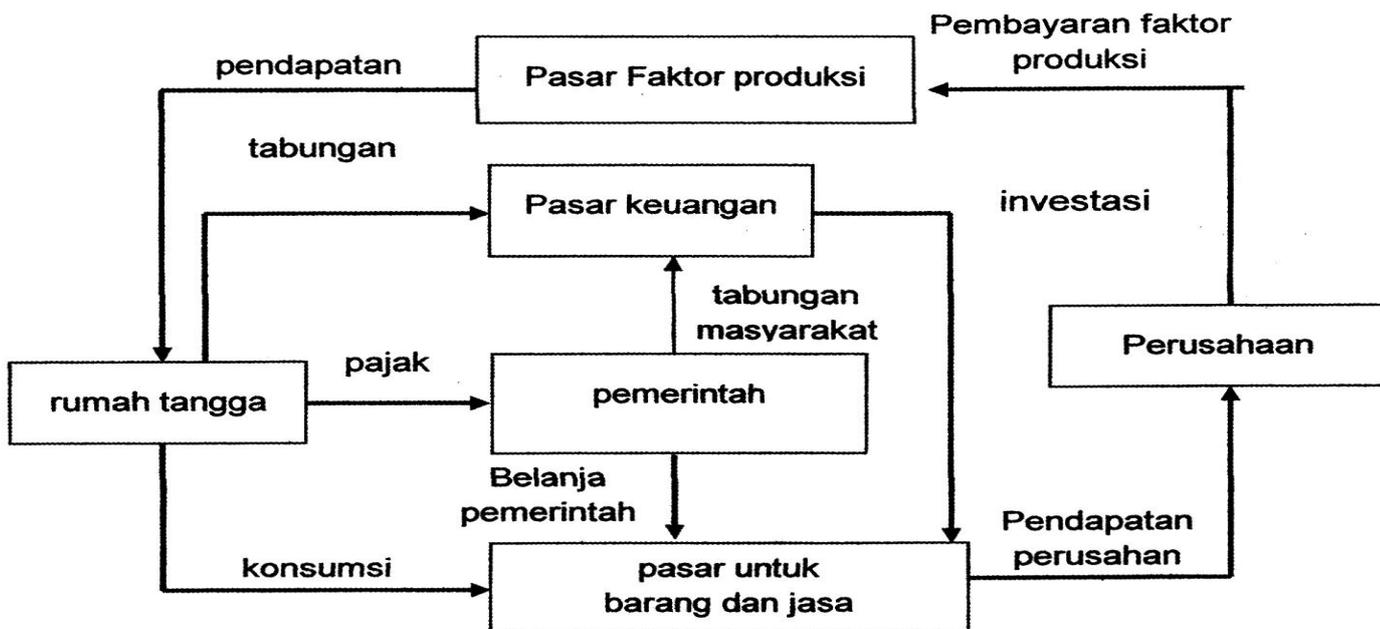
- (a) Konsumsi (C)
- (b) Investasi (I)

- (c) Pemerintah pembelian (G)
- (d) Ekspor neto (NX).

Teori Konsumsi

Konsumsi Lembaga

Gambar 2.1. Diagram Aliran sirkuler uang dalam perekonomian



Menurut Dumairy (2004), Konsumsi adalah pembelanjaan atas barang-barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelanjaan tersebut. Pembelanjaan masyarakat atas makanan, pakaian dan barang-barang kebutuhan mereka yang lain digolongkan pembelanjaan atas konsumsi. Barang-barang yang di produksi untuk digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi. Oleh Keynes hal ini dinyatakan suatu persamaan sebagai berikut :

$$C = a + bY, \text{ dimana } a > 0, 0 < b < 1$$

C = konsumsi, Y=pendapatan disposable income, a= konstanta, b= kecenderungan mengkonsumsi marjinal sumber (Mankiw (2003).

Konsumsi Pemerintah

Olivier Blanchard. (2009 : 48) Komponen ketiga dari permintaan dalam model adalah belanja pemerintah (G). G menggambarkan kebijakan fiskal-pilihan pajak dan pengeluaran pemerintah. G dan T sebagai variabel eksogen. Hal ini didasarkan pada dua argumen yaitu : *Pertama*, pemerintah tidak berperilaku dengan keteraturan yang sama sebagai konsumen atau perusahaan, tetapi perilaku pemerintah mudah ditebak.

Untuk membuat produknya, perusahaan memerlukan dua faktor produksi, modal dan tenaga kerja. Adapun fungsi produksi yang dipergunakan adalah :

$$Y = f(K, L),$$

dimana Y adalah jumlah unit yang diproduksi (output perusahaan), K jumlah mesin yang digunakan (jumlah modal), dan L jumlah jam kerja yang digunakan oleh karyawan perusahaan (jumlah tenaga kerja). dimana teknologi dinyatakan konstan dalam fungsi produksi. Perusahaan memproduksi lebih banyak output hanya jika menggunakan lebih banyak mesin atau jika karyawannya bekerja lebih. Perusahaan memperoleh kedua faktor produksi dari rumah tangga yang memiliki mereka.

Kedua, salah satu tugas dari makro ekonomi adalah berpikir tentang implikasi dari belanja alternatif dan keputusan pajak. Fungsi konsumsi adalah sama dengan persamaan perilaku, dan kondisi bahwa produksi sama dengan permintaan adalah kondisi ekuilibrium. Adapun kondisi Equilibrium adalah sebagai berikut :

$$Y = c_0 + c_1 (Y-T) + I + G$$

Dalam kondisi keseimbangan, produksi, Y, (sisi kiri persamaan) adalah sama dengan permintaan (yang

hubungkan pernyataan ini ke sisi mobil kanan). Permintaan pada gilirannya tergantung pada pendapatan (Y) yang sama dengan produksi.

Dimana : $Y = C + I + G + X - IM$

Karena pengeluaran untuk impor dimasukkan dalam pengeluaran domestik ($C + I + G$), dan karena barang dan jasa penting dari luar negeri bukan bagian dari output suatu negara, persamaan ini mengurangi pengeluaran untuk impor, definisi ekspor net ekspor dikurangi impor ($NX = X - IM$), identitas menjadi

$$Y = C + I + G + NX.$$

Persamaan ini menyatakan bahwa pengeluaran atas output domestik adalah total jumlah dari konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor bersih. Ini seringkali dinyatakan sebagai perhitungan pendapatan nasional.

Teori Investasi (PMTB)

Dornbusch, Rudiger et al (2008 : 340) menyatakan bahwa Teori investasi adalah permintaan modal (*theory of the demand for capital*). Dalam makro ekonomi, "investasi" mempunyai arti lebih sempit lagi, yang secara teknis berarti: *investasi* adalah arus pengeluaran yang menambah stok modal fisik. Para ekonom mempelajari investasi untuk memahami fluktuasi dalam output barang dan jasa perekonomian dengan lebih baik. Model-model GDP didasarkan pada fungsi investasi sederhana yang mengkaitkan investasi dengan tingkat bunga riil: $I = I(r)$. fungsi itu menyatakan bahwa kenaikan tingkat bunga riil menurunkan investasi. Jumlah barang investasi yang diminta tergantung pada tingkat bunga, yang mengukur biaya dari dana yang digunakan untuk membiayai investasi. Untuk berinvestasi di proyek untuk mendapatkan keuntungan, pengembalian (pendapatan dari peningkatan produksi barang dan jasa) harus melebihi biayanya (pembayaran untuk dana pinjaman). Jika tingkat bunga naik, akan sedikit proyek investasi yang menguntungkan, dan kuantitas barang-barang investasi yang diminta turun.

Stok (Inventori)

Abdul Hakim. (2010 : 65) Stok modal memegang peran yang sangat penting dalam menentukan cepat lambatnya proses pertumbuhan output. Besar kecilnya stok modal dalam perekonomian pada saat tertentu akan sangat menentukan output yang diproduksi, dan dengan demikian menentukan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Stok modal mempengaruhi tingkat output melalui dua jalur, yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Yang dimaksud pengaruh langsung adalah posisi modal sebagai input dari output. Pengaruh tidak langsung modal terhadap output dihasilkan dari peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hal ini bisa terjadi karena tambahan modal akan

memungkinkan adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Makin besar modal yang digunakan dalam proses produksi, maka skala produksi akan semakin besar, sehingga makin banyak yang harus dikerjakan dalam satu divisi kerja tertentu.

Ekspor Neto

Menurut Nopirin (2004,239) Di dalam ekonomi terbuka terdapat dua variabel yaitu kegiatan ekspor (X) dan impor (M) barang dan jasa. Ekspor berasal dari produksi dalam negeri dijual/dipakai oleh penduduk luar negeri, maka ekspor merupakan injeksi ke dalam aliran pendapatan seperti halnya investasi. Sedangkan impor merupakan kebocoran dari pendapatan, karena menimbulkan aliran modal ke luar negeri. Oleh karena itu pendapatan yang ditimbulkan karena proses produksi dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa dalam negeri (C), atau keluar dari aliran pendapatan sebagai tabungan (S) atau pembelian barang dari luar negeri (M). Impor tidak hanya tergantung pada pendapatan. Faktor lain yang juga mempengaruhi seperti misalnya daya saing produksi dalam negeri, selera dan sebagainya. Perubahan faktor-faktor ini akan menggeser fungsi impor. Seperti misalnya karena inflasi terjadi di dalam negeri sehingga daya saing menurun, maka impor cenderung naik. Ekspor suatu negara adalah impor negara lain, ekspor tergantung dari pendapatan luar negeri bukan pendapatan nasional. Berapa pun besarnya pendapatan nasional, ekspor tetap. Ini berarti pendapatan nasional tidak mempengaruhi ekspor, tetapi ekspor mempengaruhi pendapatan nasional.

Dengan harga dianggap tetap ekspor tergantung dari pendapatan luar negeri bukan pendapatan nasional. Menurut Olivier Blanchard. (2009 : 45) Perbedaan antara ekspor dan impor, (X-M), disebut ekspor bersih, atau neraca perdagangan. Jika ekspor melebihi impor (X>M), negara dikatakan mengalami surplus perdagangan. Jika ekspor kurang dari impor (X<M) maka negara dikatakan mengalami defisit perdagangan.

Teori Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Menurut Prof Yuyun Wirasasmita, Pembahasan Kontemporer mengenai ekonomi makro tidak terlepas dari pembahasan masalah pengangguran/kesempatan kerja dan kemiskinan. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana orang ingin, serta dapat bekerja akan tetapi mereka tidak dapat mencapai pekerjaan dengan tingkat upaya yang berlaku. Adapun jenis-jenis pengangguran disini adalah cyclical unemployment, technological unemployment, Frictional Unemployment, Deflationary unemployment. Dalam pengertian angkatan kerja harus diperhitungkan tingkat partisipasi dalam kegiatan ekonomi di antara jumlah tenaga kerja untuk setiap kelompok umur dan jenis

kelamin. Pertambahan penduduk dan angkatan kerja di satu pihak dan laju serta arah investasi di pihak lain mempengaruhi perluasan kesempatan kerja dan pengangguran. Bertambahnya angkatan kerja mempengaruhi tingkat upah riil maupun pembagian pendapatan masyarakat. Selain itu, pertambahan penduduk dan angkatan kerja serta tingkat fertilitas mempengaruhi tingkat tabungan dan tingkat investasi yang diperlukan oleh masyarakat yang sedang membangun. Satu sama lain tidak lepas dari pola pengeluaran konsumsi. Di mana pendapatan per kapitanya rendah dan tertekan, maka lebih banyak pengeluaran yang secara nisbi dilakukan untuk komponen kebutuhan pangan. Dengan kata lain, masalah kesempatan kerja dan pengangguran (secara terbuka maupun terselubung) langsung berkaitan dengan keadaan kemiskinan absolut dan tingkat hidup yang rendah dan tertekan.

Teori Kemiskinan

Menurut Andre Bayo Ala, 1981 kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta ketrampilan dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan juga saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Dan aspek lainnya dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif. Kita sering mendengar istilah kemiskinan perdesaan, kemiskinan perkotaan, dan sebagainya. Namun, hal tersebut bukan berarti hanya “desa” atau “kota”-nya yang mengalami kemiskinan (kemiskinan “desa” atau “kota” salah satunya diindikasikan oleh pendapatan daerah yang begitu rendah), namun juga orang-orang atau penduduk (manusianya) yang menderita kemiskinan. Secara garis besar definisi miskin dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu: (1) aspek primer, yaitu berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, dan ketrampilan dan (2) aspek sekunder, yaitu berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Ada dua macam ukuran kemiskinan yang paling umum digunakan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

Kemiskinan Absolut, Jika pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. UNRISD (*United Nation Research Institute for Sosial Development*) menggolongkan kebutuhan dasar manusia ke dalam tiga kelompok utama, yaitu: (1) kebutuhan fisik primer, yang terdiri dari kebutuhan gizi, perumahan dan kesehatan (2) kebutuhan kultural, yang terdiri dari pendidikan, waktu luang (*leisure*), dan rekreasi serta ketenangan hidup dan (3) kebutuhan yang muncul karena adanya surplus pendapatan, sehingga kemudian muncul sebuah keinginan untuk mencapai kebutuhan lain yang lebih tinggi tingkatannya. Kebutuhan dasar tidak hanya meliputi kebutuhan fisik setiap orang atau keluarga, namun juga meliputi kebutuhan atas fasilitas lingkungan kehidupan manusia. *Kemiskinan Relatif* adalah Orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti orang tersebut “tidak miskin.” Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Menurut UNDP, ada tiga nilai pokok yang menentukan tingkat kemiskinan yaitu:

- (1) Tingkat kehidupan, dengan asumsi bahwa karena tingkat kesehatan yang begitu rendah, sehingga lebih dari 30 persen penduduk negara-negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun.
- (2) Tingkat pendidikan dasar, diukur oleh persentase penduduk usia dewasa yang buta huruf, dengan beberapa penekanan tertentu, misalnya hilangnya hak pendidikan pada kaum wanita.
- (3) Tingkat kemapanan ekonomi, diukur oleh persentase penduduk yang tidak memiliki akses terhadap prasarana kesehatan dan air bersih, serta persentase anak-anak di bawah usia lima tahun yang kekurangan gizi.

Oleh karena itu, nilai Indeks Kemiskinan Manusia merepresentasikan proporsi jumlah penduduk di suatu wilayah yang “kehilangan” tiga nilai pokok tersebut. Angka Indeks Kemiskinan Manusia yang rendah menunjukkan tingkat kemiskinan yang rendah pula (persentase penduduk yang kehilangan hak atas tiga nilai utama tersebut relatif kecil), begitu pula sebaliknya.

Teori kesejahteraan masyarakat dan Kriteria keluarga sejahtera

Sen, (2002: 8) mengatakan bahwa *welfare economics* merupakan suatu proses rasional ke arah melepaskan masyarakat dari hambatan untuk

memperoleh kemajuan. Kesejahteraan sosial dapat diukur dari ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), emenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*humandevlopment*). Selanjutnya Sen, A. (1992: 39-45) lebih memilih *capability approach* didalam menentukan standard hidup. Sen mengatakan: *the freedom orability to achieve desirable "functionings" is more importance than actual outcomes.*

Menurut BKKBN (Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Kesejahteraan keluarga digolongkan kedalam 3 golongan; yaitu :

- Keluarga Sejahtera Tahap I dengan kriteria sebagai berikut : Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama, Pada umumnya anggota keluarga makan 2 kali sehari atau lebih, Anggota keluarga memiliki pakaian berbeda dirumah / pergi/bekerja / sekolah, Bagian lantai yang terluas bukan dari tanah, Anak sakit ataupun pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber KB dibawa kesarana kesehatan.
- Keluarga Sejahtera Tahap II, meliputi : Anggota keluarga melaksanakan ibadah agama secara teratur, Paling kurang sekali seminggu lauk daging / ikan / telur, setahun terakhir anggota keluarga menerima satu stel pakaian baru, Luas lantai paling kurang 8 m² untuk tiap penghuni, Tiga bulan terakhir anggota keluarga dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan tugas, Ada anggota keluarga umur 15 tahun keatas berpenghasilan tetap, Anggota keluarga umur 10 – 60 th. bisa baca tulis latin, Anak umur 7 – 15 th. Bersekolah, PUS dengan anak hidup 2 atau lebih saat ini memakai alat kontrasepsi.
- Keluarga Sejahtera Tahap III, meliputi : Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama, Sebagian penghasilan keluarga ditabung, Keluarga makan bersama paling kurang sekali sehari untuk berkomunikasi, Keluarga sering ikut dalam kegiatan mesyarakat dilingkungan tempat tinggal, Keluarga rekreasi bersama paling kurang sekali dalam enam bulan, Keluarga memperoleh berita dari surat kabar/majalah/TV/radio, Anggota keluarga menggunakan sarana transportasi setempat.
- Keluarga Sejahtera Tahap III Plus, meliputi : Keluarga secara teratur memberikan sumbangan, Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus yayasan / institusi masyarakat,

Menurut Todaro, (2007, 68) Upaya terkini untuk menganalisis perbandingan status pembangunan sosial ekonomi atau tingkat kesejahteraan adalah dengan pemahaman tentang indeks pembangunan manusia atau *Human development Indeks* (HDI). HDI ini melakukan ranking semua negara dari skala 0 (tingkat pembangunan manusia paling rendah) sampai dengan 1 (tingkat pembangunan manusia yang

tertinggi) berdasarkan tiga tujuan yaitu atau produk akhir pembangunan yaitu : masa hidup (*longevity*) yang diukur dengan usia harapan hidup, pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan kemampuan baca tulis orang dewasa secara tertimbang (dua pertiga) dan rata-rata tahun bersekolah (sepertiga), serta standart kehidupan (*standart of living*) yang diukur dengan pendapatan riil perkapita, disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power of parity* atau PPP) dari mata uang setiap negara untuk mencerminkan biaya hidup dan untuk memenuhi asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun dari pendapatan. Dengan menggunakan ketiga ukuran pembangunan dan menerapkan rumus tersebut maka HDI memeringkat semua negara menjadi tiga kelompok tingkat pembangunan manusia yaitu rendah (0,0-0,499), menengah (0,50-0,799), dan tinggi (0,8-1).

Untuk mencari indeks usia harapan hidup (dengan pendekatan kesehatan) UNDP memulai dengan usia Harapan hidup di suatu wilayah, kemudian menguranginya dengan 25 tahun. Angka 25 adalah usia harapan hidup terendah yang mungkin ada di suatu wilayah selama generasi terakhir. Kemudian hasilnya dibagi dengan 85 tahun dikurangi 25 tahun (85-25=60 tahun). 60 tahun ini mencerminkan kisaran usia harapan hidup yang diharapkan selama generasi sebelum dan generasi berikutnya.

Indeks pendidikan terdiri dari dua bagian yaitu dua pertiga untuk kemampuan baca tulis, dan sepertiga untuk masa bersekolah. Indeks iini dibatasi sampai dengan 100%. Indeks kemampuan baca tulis orang dewasa dikalikan dengan 2/3 dan indeks masa bersekolah dikalikan 1/3 . Karena baca tulis adalah karakter fundamenta dari orang terdidik.

PENELITIAN YANG RELEVAN

1. Farid Alfofari (2008), tulisannya yang berjudul Analisis tingkat pengangguran di Indonesia selama tahun 1980-2007, menyatakan : Kenaikan dalam angkatan kerja tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas produksi akibatnya jumlah pengangguran meningkat seiring dengan peningkatan total angkatan kerja. Jumlah pengangguran merupakan masalah serius dan berdampak pada negara, karena jumlah pengangguran merupakan indikator dari kemajuan ekonomi suatu negara yang memperlihatkan tingkat memadai atau tidaknya distribusi pendapatan di suatu negara. Total populasi, upah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dan kuat pada tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam populasi dan angkatan kerja, upah dan pertumbuhan ekonomi segaris dengan peningkatan jumlah pengangguran.

2. Ardi Hamzah (2010), Tulisannya yang berjudul : Analysis penerimaan dan pengeluaran pada pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Menyatakan : Pengeluaran dan penerimaan didalam APBN berpengaruh positif dan signifikan pada pengangguran dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada pengangguran.
3. Rasidin K Sitepu dan Bonar M. Sinaga (2009) dalam tulisannya yang berjudul Dampak investasi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Menyatakan : Investasi sumber daya manusia (SDM) diwakili oleh pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Investasi SDM mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rumah tangga, indeks rasio kemiskinan, indeks kesenjangan, dan indeks identitas kemiskinan yang menurun. Kecuali untuk rumah tangga yang bukan angkatan kerja di kota. Investasi SDM untuk pendidikan memberi manfaat lebih besar bagi rumah tangga pedesaan dibandingkan dengan rumah tangga perkotaan, terutama untuk rumah tangga buruh tani dan pengusaha pertanian di pedesaan. Sedangkan investasi kesehatan memberi manfaat lebih besar bagi Rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota.
4. Rizki Fillaili (2008) dalam tulisannya : Memahami jalan keluar dari kemiskinan: Kapasitas agensi dan mobilitas kesejahteraan. Menyatakan: kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang di masyarakat yang bersifat sementara dan dinamis. Kemiskinan bukanlah suatu karakteristik yang melekat pada diri seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus. Walaupun dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama, namun secara umum kemiskinan bukanlah suatu hal yang bersifat permanen.
5. Rochman Achwan (2008) dalam tulisannya : Struktur dan agensi dalam studi kemiskinan. Menyatakan: Program bantuan dan infrastruktur publik (struktur) dan kerja keras, ketrampilan dan tingkat pendidikan (agensi pada tingkat individu) berpengaruh dalam memperbaiki kondisi kesejahteraan. Komponen struktur mendorong stratifikasi ekonomi yaitu : kelompok *always rich* (tetap kaya), kelompok *mover*(berhasil meningkatkan kesejahteraan), kelompok *faller* (jatuh miskin) dan *chronic poor* (selalu miskin). Kelompok *mover* walaupun berhasil meningkatkan kesejahteraannya, tidak sepenuhnya berhasil keluar dari kemiskinan dan cenderung berada dalam kondisi rentan. Ketersediaan modal manusia dan kemampuan masyarakat dalam membangun jejaring sosial lintas komunitas perlu dipertimbangkan dalam setiap implementasi ide baru, baik dalam bentuk undang-undang maupun program pembangunan.
6. Adrian sutawijaya Zulfahmi (2007) dalam tulisannya : Pengaruh ekspor dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 1980-2006. Menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mengukur kemampuan negara untuk meningkatkan output melebihi pertumbuhan penduduk. Ekspor dan investasi adalah hal yang penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ekspor akan menghasilkan valuta asing yang akan digunakan untuk membiayai impor. Khususnya impor barang mentah dan barang modal yang dibutuhkan dalam proses produksi. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif pada investasi pemerintah, swasta, dan ekspor non migas. Sementara ekspor migas berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan investasi pemerintah, investasi swasta, ekspor migas dan non migas dapat menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi.
7. Duncan Hodge (2009), dalam Jurnalnya "*Growth, employment and unemployment*" menyatakan pertumbuhan angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran adalah respon dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan investasi baik di sektor swasta maupun publik untuk memperluas dan memelihara infrastruktur negara.
8. Ismail Ahtar dan Latif Ozturk (2009) dalam jurnalnya yang berjudul "*can unemployment be cured by economic growth and foreign direct investment in Turkey ?*" Menyatakan bahwa variabel ekspor memiliki pengaruh positif pada GDP tetapi tidak signifikan. Ekspor tidak menjadi leader sektor dari pertumbuhan ekonomi. Perubahan GDP tidak mengurangi tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi pengentasan kemiskinan, terutama ketika mengarah ke peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesempatan kerja untuk kegiatan produktif diantara masyarakat miskin. Tingkat awal dari pertumbuhan ekonomi tidak rentan terhadap pengurangan kemiskinan, perubahan positif pada pertumbuhan ekonomi rentan terhadap pengurangan kemiskinan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan ekonomi yang stabil, investasi di bidang pertanian, pembangunan infrastruktur dan tata kelola yang baik.
9. Felix K. Rioja (2001), dalam jurnal "*Growth, welfare and Public Infrastructure: a general equilibrium analysis of Latin American economies*" menyatakan : investasi infrastruktur penting bagi kinerja perekonomian suatu negara. Infrastruktur dapat memiliki efek positif pada output, investasi

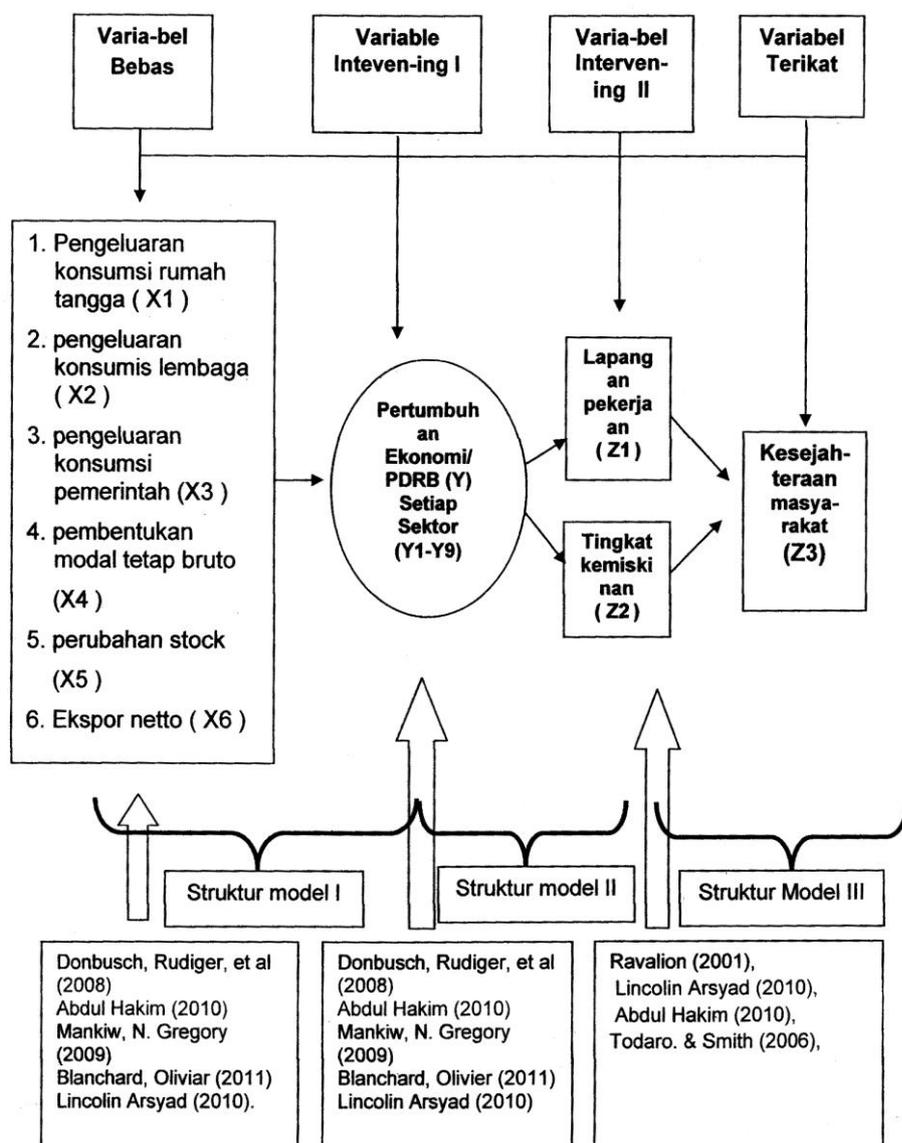
swasta dan kesejahteraan. Namun peningkatan investasi infrastruktur yang melebihi batas tertentu dapat merugikan

- Olli Varis dalam jurnalnya *“Poverty, Economic Growth, deprivation, and water : The cases of Cambodia and Vietnam”* menyatakan bahwa pengentasa kemiskinan adalah agenda dari

KERANGKA PEMIKIRAN.

Dalam penelitian ini dilakukan analisis dengan menggunakan beberapa struktur model yaitu :

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran



(X5), dan Ekspor Neto (X6) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Banten (PDRB) (Y) secara simultan maupun parsial.

2. Terdapat pengaruh pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (Y) Banten terhadap lapangan pekerjaan (Z1).

3. Terdapat pengaruh pertumbuhan Ekonomi (PDRB) (Y) Banten terhadap tingkat kemiskinan (Z2).

4. Terdapat pengaruh lapangan kerja dan tingkat kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat.

5. Terdapat pengaruh secara simultan dan secara Parsial dari variabel konsumsi rumah tangga (X1), pengeluaran lembaga (X2), Pengeluaran Pemerintah (X3), Investasi (X4), Inventori / Stok (X5), dan Ekspor Neto (X6) terhadap Pertumbuhan masing-masing sektor perekonomian (Y1 s/d Y9).

6. Terdapat pengaruh antara pertumbuhan setiap sektoral dengan lapangan pekerjaan.

7. Terdapat pengaruh antara pertumbuhan setiap sektoral dengan tingkat kemiskinan.

HIPOTESIS PENELITIAN

- Terdapat pengaruh konsumsi rumah tangga (X1), pengeluaran lembaga (X2), Pengeluaran Pemerintah (X3), Investasi (X4), Inventori / Stok

TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini mencakup analisis makro dan sektor-sektor ekonomi sejumlah 5 (lima) kabupaten di wilayah Provinsi Banten, antara lain Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang. Adapun kurun waktu

penelitian adalah deret waktu yaitu selama 10 tahun dari tahun 2000 sampai tahun 2010.



VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah tiga jenis yaitu variabel bebas, variabel antara (terikat bebas), dan variabel terikat.

Variabel bebas meliputi :

- (a) Konsumsi rumah tangga (X1)
- (b) Konsumsi lembaga (X2)
- (c) Konsumsi pemerintah (X3)
- (d) Investasi (PMTB) (X4)
- (e) Perubahan stok (X5)
- (f) Ekspor neto (X6)

Variabel Antara I:

PDRB (Product Domestic Regional Bruto) (Y). Sektor-sektor dalam PDRB meliputi : Sektor pertanian (Y1), pertambangan (Y2), industri (Y3), listrik, gas, dan air bersih (Y4), bangunan (Y5), perdagangan (Y6), pengangkutan dan komunikasi (Y7), keuangan (Y8), jasa (Y9).

Variabel Antara II :

- Lapangan Pekerjaan / Kesempatan Kerja (Z1)
- Tingkat Kemiskinan (Z2)

Variabel Terikat :

- Kesejahteraan masyarakat (Z3)

A. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator dan pengertian	Skala pengukuran
1.	Produk domestik regional bruto	jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu	rasio
SEKTOR EKONOMI			
1.	Pertanian	Kegiatan pertanian tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan serta kegiatan perikanan. Termasuk kegiatan pengolahan hasil-hasil pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang dilakukan secara sederhana, masih mempergunakan peralatan tradisional. (Data produksi)	Rasio
2.	Pertambangan	Seluruh usaha kegiatan penambangan,	Rasio

	dan penggalian	penggalian dan penggaraman rakyat. Untuk memperoleh segala macam barang tambang. (data produksi)	
3.	Industri pengolahan	Semua kegiatan produksi yang bertujuan meningkatkan mutu barang dan jasa. (data produksi)	Rasio
4.	Listrik dan air minum	Kegiatan pembangkitan dan distribusi tenaga listrik baik yang diselenggarakan oleh PLN maupun non PLN. Produksi listrik ialah jumlah KWH tenaga listrik yang dibangkitkan yang meliputi tenaga listrik yang terjual, digunakan sendiri serta susut dalam transmisi dan distribusi. (Data output listrik PLN dan Non PLN yang dibangkitkan di wilayah bersumber dari Kantor Wilayah PLN) Sektor air minum mencakup kegiatan pembersihan, pemurnian dan proses kimiawi lainnya untuk menghasilkan air bersih, termasuk penyalurannya melalui pipa baik ke rumah tangga maupun ke sektor lain sebagai pemakai. (Data produksi air minum diperoleh dari laporan PDAM)	Rasio
5	Bangunan	Kegiatan konstruksi yang dilakukan baik oleh kontraktor umum yaitu perusahaan yang melakukan pekerjaan konstruksi untuk pihak lain maupun oleh kontraktor khusus yaitu unit usaha dan individu yang melakukan kegiatan konstruksi untuk dipakai sendiri. Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan pembuatan, pembangunan, pemasangan dan perbaikan berat maupun ringan dari semua jenis konstruksi. (data nilai pekerjaan yang telah dilakukan selama tahun yang bersangkutan)	Rasio
6	Pengangkutan dan komunikasi	Kegiatan angkutan, jasa penunjang angkutan dan komunikasi. Kegiatan pengangkutan mengangkut barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain atas dasar suatu pembayaran. Jasa penunjang angkutan dan pergudangan bertujuan untuk membantu dan memperlancar kegiatan angkutan, terdiri dari jasa-jasa terminal.	Rasio

		Komunikasi meliputi usaha jasa pos dan giro seperti jasa pengiriman surat, wesel, telegram serta jasa penunjang telekomunikasi (data rugi laba Perum Pos dan Giro dan Perum Telekomunikasi)	
7	Perdagangan dan hotel	<p>Pengumpulan barang dari produsen atau pelabuhan impor dan mendistribusikannya kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut.</p> <p>(Data penjumlahan margin barang yang timbul dari seluruh barang yang diperdagangkan)</p> <p>Kegiatan restoran adalah penyediaan makanan dan minuman jadi yang dapat dinikmati langsung di tempat penjualan.</p> <p>(Data pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor restoran).</p> <p>Kegiatan perhotelan meliputi usaha penyediaan akomodasi untuk umum berupa tempat penginapan untuk jangka waktu relative singkat.</p> <p>(Data tingkat hunian kamar yang diterbitkan BPS)</p>	Rasio
8	Bank dan Lembaga Keuangan	<p>Usaha jasa perbankan dan moneter baik yang dikelola oleh pemerintah maupun jasa, usaha jasa keuangan lain (seperti koperasi, pedagang valuta asing), usaha jasa asuransi.</p> <p>(Data penerimaan provisi dan komisi, penerimaan netto, transaksi devisa, pendapatan operasional lain serta imputasi jasa pelayanan bank).</p>	Rasio
9	Jasa-jasa	Kegiatan jasa pemerintahan umum dan pertahanan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, jasa kemasyarakatan (meliputi pendidikan, kesehatan, riset), jasa hiburan dan rekreasi, jasa perbengkelan, jasa perorangan dan rumah tangga.	Rasio
10	Pengeluaran konsumsi rumah tangga	Nilai pembelanjaan yang dilakukan rumah tangga untuk membeli berbagai kebutuhannya dalam satu tahun	rasio
11	Investasi atau pembentukan modal sektor swasta	Pengeluaran untuk membeli barang modal yang akan menaikkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang	rasio
12	Pengeluaran Pemerintah	Pembelian atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah yang akan dikonsumsi	rasio
13.	Inventory stock	Nilai dari persediaan barang yang disimpan	rasio

13	Ekspor Netto	Nilai ekspor yang dilakukan suatu Negara dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan nilai impor dalam periode yang sama	Rasio
14	Pengeluaran lembaga Nirlaba	Pengeluaran lembaga yang sifatnya non profit seperti misalnya pengeluaran untuk pemilihan umum	Rasio
15.	Penyediaan Lapangan Pekerjaan	Jumlah lapangan pekerjaan yang siap menampung angkatan kerja di Provinsi Banten	rasio
16	Jumlah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup	Ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya	rasio
17	Kesejahteraan	Kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya	Rasio

INSTRUMEN PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data runtut waktu (*time series*) dan data cross section. Data yang tersedia adalah data dalam tahunan, antara kurun waktu tahun 2000-2010. Pemilihan kurun waktu tersebut dengan pertimbangan bahwa mencakup kondisi dan situasi perekonomian Indonesia baik sebelum terjadinya krisis ekonomi maupun setelah terjadinya krisis ekonomi. Data yang digunakan dalam penelitian ini

tentang sektor-sektor ekonomi wilayah Provinsi Banten.

TEKNIK ANALISIS

Metode analisis Analisis Regresi Linear Berganda (*Multivariate Linear Regression Analysis*). Untuk menganalisa nilai dari parameter dalam persamaan regresi berganda diatas digunakan metode *ordinary least Square* (OLS) dimana model regresi yang digunakan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6$$

$$Z_1 = a + bY$$

$$Z_2 = a + bY$$

$$Z_3 = a + b_1Z_1 + b_2Z_2$$

$$Z_1 = a + b_1Y_1 + b_2Y_2 + b_3Y_3 + b_4Y_4 + b_5Y_5 + b_6Y_6 + b_7Y_7 + b_8Y_8 + b_9Y_9$$

$$Z_2 = a + b_1Y_1 + b_2Y_2 + b_3Y_3 + b_4Y_4 + b_5Y_5 + b_6Y_6 + b_7Y_7 + b_8Y_8 + b_9Y_9$$

$$Z_3 = a + b_1Y_1 + b_2Y_2 + b_3Y_3 + b_4Y_4 + b_5Y_5 + b_6Y_6 + b_7Y_7 + b_8Y_8 + b_9Y_9$$

1. Pengujian Ketepatan (*good ness of fit*) dari model

(a) Uji Signifikansi Simultan (F-test)

Penentuan Nilai Kritis, Pengujian yang dilakukan menggunakan distribusi F dengan membandingkan antara nilai kritis dengan nilai F hitung (F_{ratio}) dari hasil perhitungan, yang dapat digunakan formulasi sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{MSR}{MSE}$$

nilai statistik yang digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan pengaruh antara dua variable. Secara matematis, koefisien determanasi dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

di mana :

SSR = Sum of Square Regression, SST = Sum of Square Total

(b) Pengujian *good ness of Fit* (Uji R^2)

Uji R^2 atau Koefisien determinasi adalah

Pengujian mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi ini dilakukan sebelum output model dianalisis. Asumsi-asumsi yang diuji meliputi : Kenormalan, Tidak terdapatnya situasi multikolinieritas yang merusak model, Tidak terdapatnya situasi autokorelasi, Tidak terdapatnya situasi heteroskedastisitas

Adapun tahap pengujian yang dilakukan adalah :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data., Analisis statistik yang dilakukan adalah dengan melihat bentuk sebaran data pada grafik histogram. Jika bentuk tampilan histogram menyerupai distribusi normal maka data dapat dinyatakan normal. Atau dengan menggunakan data PP plot, suatu data dinyatakan normal jika nilai probability yang diharapkan adalah sama dengan nilai probability pengamatan..

2. Uji Multi kolinearitas

Uji ini menyatakan bahwa variable independen harus bebas dari korelasi antar variable independen. Gejala multikolinieritas ini dinyatakan dengan korelasi yang signifikan antarvariabel independen. Jika terjadi langkah untuk memperbaiki model adalah dengan menghilangkan variable dari model regresi, sehingga dapat dipilih model yang paling baik. Untuk memperoleh model yang terbaik dapat dilakukan langkah pemilihan variable dengan

metode stepwise, forward atau backward. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menghitung *Variance Inflation Faktor* (VIF). $VIF > 10$ menunjukkan adanya situasi multikolinieritas yang sangat tinggi antar variabel. VIF (*Variance Inflation Faktor*) dan tolerance ditunjukkan oleh rumus sebagai berikut (Gujarati, 2003):

$$R^2 = \frac{1}{1 - R^2} \text{ tolera VIF} \quad \text{dimana ; } 1 - R^2$$

3. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu situasi dimana terdapat hubungan antar residual atau adanya kesalingtergantungan antar data observasi terdahulu dengan sesudahnya (Gujarati,2003). Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan nilai statistik Durbin-Watson (DW). tinggi rendahnya situasi autokorelasi dapat pula dilihat melalui koefisien autokorelasi $r^d = 1 - (d/2)$.

Ada tidaknya situasi autokorelasi diputuskan dengan memposisikan nilai d dengan nilai d_L (batas bawah/lower) dan d_U (batas atas/upper) tabel nilai yang bergantung pada K (jumlah variabel bebas), n (jumlah data), dan taraf kesalahan $\alpha = 50\%$. Pedoman pengambilan keputusan tidaknya situasi autokorelasi dalam model dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.2 Kriteria Keputusan Autokorelasi

Durbin Watson d	Kesimpulan
$(4 - d_L) < d < (4 - d_U)$	Terdapat korelasi serial yang negatif
$(4 - d_L) < d < (4 - d_U)$	Tidak ada kesimpulan
$2 < d < (4 - d_U)$	Tidak terdapat korelasi serial
$d_U < d < 2$	Tidak terdapat korelasi serial
$d_L < d < d_U$	Tidak ada kesimpulan
$0 < d < d_L$	Terdapat korelasi serial yang positif

Untuk memperbaiki masalah autokorelasi dapat dilakukan langkah transformasi data, yaitu dengan cara logaritma.

4. Uji Heterokodestisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu situasi dimana varians setiap residu yang dibatasi oleh nilai tertentu dari variabel-variabel bebasnya bernilai tidak sama (heterogen). Secara teknis uji heteroskedastisitas dilakukan dengan mengkorelasikan setiap variabel bebas dengan absolute residu model melalui scatter plot, dimana jika terbentuk pola maka terjadi heteroskedastisitas. jika ada situasi heteroskedastisitas, solusinya adalah melakukan transformasi logaritmik (dalam bentuk log atau ln) atas model asal atau dengan membagi

model asal dengan salah satu variabel bebas (Gujarati, 2003).

5. Uji Linieritas

Uji ini menyatakan bahwa untuk setiap persamaan regresi linier maka hubungan antara variable independen dan dependen harus linier. Untuk mengetahuinya dapat digunakan grafik hubungan antara variable independen dan dependen.

Setelah seluruh asumsi diatas terpenuhi maka dilakukan pengujian hipotesis, baik secara simultan maupun parsial, dengan hipotesis statistik sebagai berikut (dimana j = indeks model ke-1,2,3) :

(a) Hipotesis nol dan alternatifnya untuk uji hipotesis secara simultan :

$H_0 : \beta_{1j} = \beta_{2j} = \dots = \beta_{ij} = 0$: kontribusi seluruh sektor tidak berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan PDRB

$H_a = \beta_{1j} = \beta_{2j} = \dots = \beta_{ij} \neq 0$: kontribusi seluruh sektor berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan PDRB

(b) Hipotesis nol dan alternatifnya untuk uji hipotesis secara parsial:

$H_{0,j(i)} : \beta_{ij} = 0$: kontribusi sektor ke-I tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan PDRB

$H_{1,j(i)} : \beta_{ij} \neq 0$: kontribusi sektor ke-I berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan PDRB

Hipotesis penelitian pengaruh secara simultan diuji dengan menggunakan uji P value, dengan kriteria :

H_0 ditolak jika P value (sign) $< \alpha$

H_0 diterima. Jika P value (sign) $> \alpha$

Untuk memilih variabel yang tepat untuk dimasukkan ke dalam persamaan dalam membentuk persamaan terbaik, maka analisis stepwise dapat dipergunakan. Pada analisis dengan menggunakan stepwise, dapat digunakan metode forward dan backward.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengumpulan data dilapangan yang bersumber dari BPS Tahun 2000 – 2010 diperoleh data PDRB sebagaimana tertera pada tabel 4.1 :

Tabel 4.1 Data PDRB Berdasarkan Penggunaan Harga Konstan

Tahun	Konsumsi RT (X1)	Konsumsi Lembaga (X2)	Konsumsi Pemerintah (X3)	Modal Tetap Bruto (X4)	Perubahan Stok (X5)	Ekspor Netto (X6)
2000	30.426.209,12	326.736,86	2.112.156,31	10.762.698,07	5.268.001,84	5.231.208,81
2001	32.368.307,57	347.592,40	2.246.974,80	11.449.678,80	5.604.257,28	5.565.115,76
2002	34.071.902,71	365.886,74	2.365.236,63	12.052.293,47	5.899.218,19	5.858.016,59
2003	37.613.392,36	403.362,22	2.594.145,61	13.465.497,02	6.464.851,47	6.034.048,07
2004	41.793.419,38	453.281,11	285.507,22	15.310.282,21	6.993.111,94	6.313.182,54
2005	47.685.057,22	529.824,72	3.190.137,04	18.097.675,69	8.059.982,84	7.059.610,96
2006	53.551.671,74	641.887,94	3.685.552,58	21.508.420,82	8.750.909,50	9.728.800,81
2007	58.928.760,34	3.954.954,20	3.872.266,85	24.294.241,24	475.004,60	15.182.613,05
2008	70.115.139,16	5.018.023,98	33.355.499,33	4.160.634,46	4.160.634,46	9.841.361,31
2009	79.147.832,69	6.388.778,84	42.110.215,18	5.374.410,74	5.374.410,74	8.556,27
2010	82.313.746,00	6.644.329,99	43.794.623,79	5.589.387,17	5.589.387,17	8.898,52

Sumber : BPS, 2000-2010

Untuk mendapatkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Ordinary Least Square yang tidak bias dan efisien, maka dilakukan pengujian asumsi untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan keindependenan data, yang hasilnya menyatakan terjadi multikolinier dan autokorelasi maka langkah selanjutnya untuk

menghilangkan pelanggaran asumsi adalah dengan melakukan transformasi data dengan menggunakan logaritma, sehingga data hasil olahan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Data Transformasi Logaritma PDRB Provinsi Banten

Tahun	Konsumsi (X1)	Lembaga (X2)	Pemerintah (X3)	Investasi (X4)	Inventory stock (X5)	Ekspor Netto (X6)	PDRB (Y)
2000	7,48325	5,51420	6,32473	7,03192	6,72165	6,71860	7,73341
2001	7,51012	5,54107	6,35160	7,05879	6,74852	6,74547	7,76029
2002	7,53240	5,56335	6,37387	7,08107	6,77079	6,76775	7,78256
2003	7,57534	5,60570	6,41399	7,12922	6,81056	6,78061	7,82331
2004	7,62111	5,65637	5,45562	7,18498	6,84467	6,80025	7,86755
2005	7,67838	5,72413	6,50381	7,25762	6,90633	6,84878	7,92748
2006	7,72877	5,80746	6,56650	7,33261	6,94205	6,98806	7,99064
2007	7,77033	6,59714	6,58797	7,38550	5,67670	7,18135	8,03141
2008	7,84581	6,70053	7,52317	6,61916	6,61916	6,99306	8,08810
2009	7,89844	6,80542	7,62439	6,73033	6,73033	3,93228	8,12401
2010	7,91547	6,82245	7,64142	6,74736	6,74736	3,94932	8,14104

Setelah dilakukan pengujian kelayakan model mempergunakan SPSS diperoleh hasil analisis sebagai makan dlakukan pengolahan data dengan berikut :

Tabel 4.3. Hasil analisis data

Variabel bebas	Variabel teikat	Uji signifikansi	Variabel yang berpengaruh	Hubungan
X1-X6	Y	Signifikan	Konsumsi Ekspor netto Investasi	Sangat Kuat (+)
Y	Z1	Signifikan	PDRB	Kuat (+)
Y	Z2	Signifikan	PDRB	Sedang (-)
Z1,Z2	Z3	Signifikan	Lap pekerjaan Tkt kemiskinan	Sedang (-)
Yi-Y9	Z1	Signifikan	Pertambangan dan penggalian	Sangat Kuat (+)
Y1-Y9	Z2	Signifikan	Penyediaa sarana listrik, gas dan air minum Bangunan	Sedang

Adapun data laju perubahan PDRB Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 DATA HASIL OLAHAN TENTANG LAJU PERUBAHAN PDRB BERDASARKAN HARGA KONSTAN PROVINSI BANTEN Tahun 2000-2010

Tahun	(ΔX1)	(ΔX2)	(ΔX3)	(ΔX4)	(ΔX5)	(ΔX6)	ΔPDRB
2000/2001	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
2001/2002	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
2002/2003	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.03	0.09
2003/2004	0.10	0.11	0.09	0.12	0.08	0.04	0.10
2004/2005	0.12	0.14	0.11	0.15	0.13	0.11	0.13
2005/2006	0.11	0.17	0.13	0.16	0.08	0.27	0.14
2006/2007	0.09	0.84	0.05	0.11	-0.06	0.36	0.15
2007/2008	0.16	0.21	0.88	-4.84	-0.99	0.82	0.43
2008/2009	0.11	0.21	0.21	0.23	0.23	-0.19	0.04
2009/2010	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.18	0.09

Sumber : Data diolah

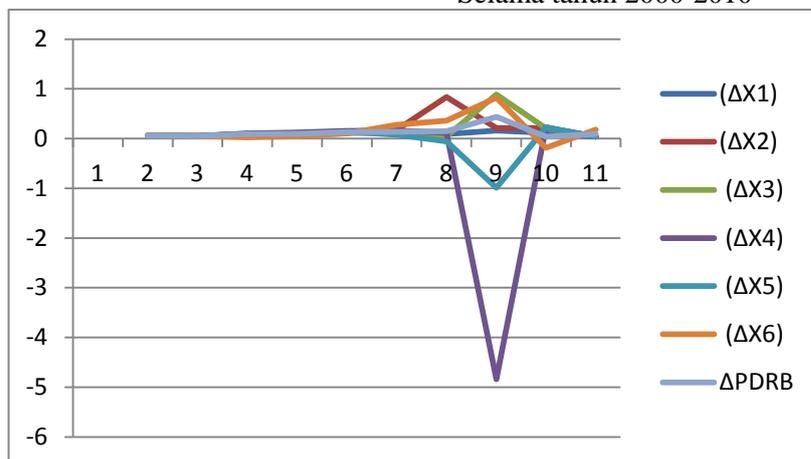
Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa laju nilainya yang positif, jika ditelaah dari sisi perubahan PDRB selalu meningkat, terlihat dari pengeluaran, variabel konsumsi rumah tangga,

konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi pemerintah terus mengalami peningkatan. Sedangkan pengeluaran dari sisi belanja modal, stock dan ekspor netto sempat

mengalami penurunan dalam suatu waktu tertentu, walaupun sesudahnya mengalami kenaikan kembali.

Adapun jika dilakukan pengamatan secara grafik dapat diketahui dari grafik berikut ini :

Grafik 4.1. Laju perubahan PDRB di Provinsi Banten Selama tahun 2000-2010



Sumber : data diolah

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa laju perubahan konsumsi rumah tangga, lembaga, perusahaan, modal brutto dan ekspor netto relatif merata perubahannya terlihat dari tingkat fluktuasi dari kelima variabel tersebut yang relatif kecil, sedangkan variabel inventory stock sempat

mengalami penurunan yang relatif besar pada tahun ke-9 (2008), dimana setelah itu kembali naik ke posisi semula. Sedangkan laju perubahan lapangan pekerjaan, jumlah penduduk miskin, dan tingkat kesejahteraan di Provinsi Banten adalah :

Tabel 4.5 Laju perubahan lapangan pekerjaan, Jumlah penduduk miskin dan tingkat kesejahteraan di Provinsi Banten

Tahun	$\Delta Z1$	$\Delta Z2$	$\Delta Z3$
2000	0.00	0.00	0.00
2001	0.03	-0.15	0.02
2002	0.10	-0.31	0.02
2003	-0.01	0.08	0.01
2004	0.03	-0.10	0.01
2005	0.01	0.06	0.01
2006	-0.02	0.08	0.00
2007	0.03	-0.02	0.00
2008	0.09	-0.09	0.01
2009	0.01	-0.04	0.01
2010	0.19	-0.04	0.00

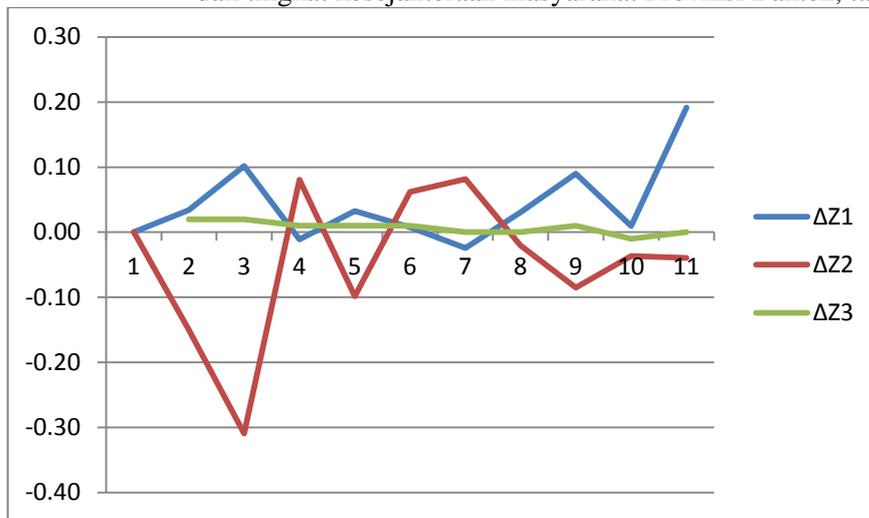
Sumber : Data diolah

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa penyediaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten sempat mengalami penurunan pada tahun 2003 dan 2006, jumlah penduduk miskin pun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2003, 2005 dan 2006. Secara

keseluruhan selama rentang waktu tahun 2000-2010 tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten relatif stabil (tidak mengalami penurunan).

Untuk mengamati dengan menggunakan grafik dapat terlihat pada grafik berikut :

Grafik 4.2. Laju perubahan Penyediaan lapangan pekerjaan, jumlah penduduk miskin, dan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten, tahun 2000-2010



Sumber : Data diolah

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa jumlah penyediaan lapangan pekerjaan relatif meningkat, penurunan terendah pada penyediaan lapangan pekerjaan ini terjadi pada tahun 2006, kondisi ini juga dibarengi oleh peningkatan jumlah penduduk miskin yang mencapai titik tertinggi pada tahun 2006. Tetapi secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi ini relatif stabil.

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\text{Model 1 : } Y = 1,354 + 0,298 X_1 + 0,285 X_2 + 0,193 X_4 + 0,166 X_5 + 0,016 X_6$$

$$\text{Model 2 : } Y = 0,016 + 1,005 X_1 + 0,007 X_6 + 0,021 X_4$$

Pada analisis awal tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Banten dipengaruhi oleh 5 variabel yaitu Konsumsi rumah tangga (X_1), Pengeluaran Lembaga (X_2), Investasi (X_4), Inventori/Stok (X_5), Export Neto (X_6). Dimana variabel yang paling dominan adalah Konsumsi rumah tangga (X_1). Jika dikaji lebih lanjut dari ke 5 variabel tersebut ternyata yang benar-benar berpengaruh terhadap perubahan PDRB adalah Konsumsi rumah tangga (X_1), Export Neto (X_6) dan Investasi (X_4).

Berdasarkan berbagai indikator, konsumsi rumah tangga, ekspor netto dan investasi diperkirakan mengalami kecenderungan yang meningkat.. Berdasarkan persamaan diketahui bahwa semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, ekspor netto dan investasi maka akan semakin besar tingkat pertumbuhan PDRB di Provinsi Banten.

Meningkatnya kinerja berbagai komponen pada sisi permintaan antara lain konsumsi dan investasi swasta yang didukung oleh kondisi ekonomi makro yang relatif baik, minat investor asing yang meningkat di Banten serta relatif kuatnya dukungan pembiayaan perbankan baik bersifat produktif maupun konsumtif memberikan kontribusi tren peningkatan pertumbuhan ekonomi triwulanan sepanjang satu tahun terakhir. Konsumsi swasta cenderung meningkat terindikasi dari peningkatan berbagai variabel dari hasil Survei Konsumen Wilayah di Banten seperti angka indeks keyakinan konsumen, indeks kondisi ekonomi saat ini serta indeks kondisi ketenagakerjaan dan penghasilan saat ini. Selain itu, peningkatan investasi swasta tercermin dari meningkatnya proyek infrastruktur, pembangunan properti swasta seperti mal, hotel dan pertokoan serta investasi pada sektor industri dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas yang sudah ada untuk mengantisipasi kenaikan permintaan pada periode yang akan datang. Sebaliknya, realisasi belanja pemerintah daerah dan ekspor-impor cenderung melambat dan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan ekonomi Banten pada periode laporan.

Sejalan dengan peningkatan ekspor. impor Banten pun mengalami tren peningkatan pada periode laporan. Meningkatnya impor Banten terutama dipengaruhi oleh peningkatan trend impor barang konsumsi dan barang modal, sementara impor bahan baku/penolong terindikasi masih relatif stabil.

Peningkatan investasi juga terindikasi dari tren perkembangan impor alat transportasi untuk industri, impor barang modal maupun tingkat konsumsi semen. Tren impor barang modal secara umum maupun alat transportasi untuk industri terindikasi meningkat seiring dengan peningkatan kinerja sektor industri.

Berdasarkan hasil olah data dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah hal terpenting yang harus diperhatikan oleh para pembuat kebijakan di Provinsi Banten. Segala hal yang berhubungan dengan konsumsi harus menjadi perhatian antara lain daya beli masyarakat dimana dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten harus mampu mempertahankan tingkat pendapatan Masyarakatnya khususnya disposable income agar dapat tetap mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi.

Analisis ini sejalan dengan kondisi konsumsi Swasta di Provinsi Banten yang bertendensi meningkat didorong oleh peningkatan pendapatan masyarakat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Tingkat konsumsi masyarakat Banten yang tinggi juga disebabkan adanya keyakinan dikalangan masyarakat akan tersedianya lapangan kerja, dan tingkat penghasilan masyarakatnya yang cenderung stabil bahkan sedikit meningkat.

Setelah konsumsi dan ekspor impor menjadi perhatian utama, variabel lain yang menjadi perhatian selanjutnya adalah investasi. Investasi di Provinsi Banten relatif stabil aliran dana utama yang masuk ke sektor industri utama Banten yaitu PT Krakatau. Hal ini sejalan dengan kebijakan PT Krakatau yang menawarkan saham perdananya (IPO) pada pertengahan triwulan tahun 2010. Walaupun sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang hanya konsumsi di Provinsi Banten yang mengalami peningkatan, sedangkan investasi dan ekspor netto mengalami penurunan,

Sedangkan model yang dibentuk dari variabel pertumbuhan (Y) dan tingkat penyediaan lapangan pekerjaan adalah :

$$Z_1 = 3,909 + 0,330 Y$$

Tingkat Z_1 lapangan pekerjaan masyarakat Banten sangat dipengaruhi oleh tingkat PDRB dimana semakin tinggi PDRB Banten semakin besar penyediaan Z_1 lapangan pekerjaan. Meningkatnya tren perekonomian Banten hingga triwulan I 2011 membawa dampak yang positif terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat Banten secara umum. Kondisi ketenagakerjaan relatif membaik yang tercermin dari terus menurunnya tingkat pengangguran di Banten hingga pada level 13,50% pada Februari 2011 atau lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 14,16% maupun dengan kondisi Agustus 2010 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 13,68%. Perbaikan ini didorong oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja di berbagai sektor.

Sedangkan untuk mengetahui peranan dari pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin diperoleh model sebagai berikut :

$$Z_2 = 7,763 - 0,230 Y$$

Tingkat kemiskinan masyarakat Banten sangat dipengaruhi oleh PDRB dimana semakin rendah tingkat PDRB maka semakin tinggi tingkat kemiskinan masyarakat.

Untuk mengetahui pengaruh dari penyediaan lapangan pekerjaan dan jumlah penduduk miskin terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten diperoleh model sebagai berikut :

$$Z_3 = 36,322 - 3,712 Z_1 - 1,933 Z_2$$

Tingkat lapangan pekerjaan dan kemiskinan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dimana semakin tinggi tingkat kemiskinan (Z_2) maka semakin tidak sejahtera masyarakat Banten. Tetapi dalam kaitannya kesejahteraan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, ternyata bertambahnya penyediaan lapangan pekerjaan ini tidak mendorong tingkat kesejahteraan. Terbukti dari tanda negatif pada koefisien Z_1 yang dapat diartikan semakin tinggi laju perubahan penyediaan lapangan pekerjaan maka semakin rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini merupakan anomali dalam perekonomian wilayah ini. Tingkat penyediaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten belum mampu menggerakkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya hal ini dimungkinkan karena tingkat penyediaan lapangan pekerjaan belum menyentuh kantong-kantong pengangguran di Provinsi Banten.

Sementara itu, peningkatan Upah Minimum Provinsi Banten pada tahun 2011 diharapkan dapat membantu mempertahankan kesejahteraan masyarakat secara umum setidaknya pada taraf yang stabil.

Pengaruh variabel X_1 s/d X_6 terhadap pertumbuhan sektoral dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$1. Y_1 = -1,856 + 2,250 X_1 - 0,580 X_2 + 0,004 X_3 - 0,378 X_4 - 0,348 X_5 - 0,020 X_6$$

Perkembangan sektor pertanian di Provinsi Banten dipengaruhi oleh X_1 Konsumsi rumah tangga, X_2 Pengeluaran Lembaga, X_3 Pengeluaran Pemerintah, X_4 Investasi, X_5 Inventori/Stok dan X_6 Export Neto dimana yang paling dominan adalah X_1 Konsumsi Rumah Tangga.

Berdasarkan Persamaan diatas diperoleh banyaknya variabel yang tidak signifikan, sehingga perlu dilakukan uji metode step wise guna membentuk persamaan yang terbaik sebagai berikut :

$$Y_1 = 0,681 + 0,830 X_1 - 0,028 X_4$$

Dari persamaan tersebut diperoleh X_1 (konsumsi) dan X_5 (inventori) yang mempengaruhi perkembangan sektor pertanian.

$$2. Y_2 = -3,810 + 1,960 X_1 - 0,391 X_2 - 0,288 X_4 - 0,260 X_5 - 0,02 X_6$$

Sektor pertambangan di Provinsi Banten di pengaruhi oleh X_1 Konsumsi Rumah Tangga, X_2 Pengeluaran Lembaga, X_3 Pengeluaran Pemerintah, X_4 Investasi, X_5 Inventori/Stok dan X_6 Export Neto

dimana yang paling dominan adalah X_1 Konsumsi Rumah Tangga.

Berdasarkan Persamaan diatas diperoleh banyaknya variabel yang tidak signifikan, sehingga perlu dilakukan uji metode step wise guna membentuk persamaan yang terbaik sebagai berikut :

$$Y2 = -2,738 + 1,056 X1 - 0,057 X4$$

Berdasarkan persamaan diatas yang paling dominan mempengaruhi perkembangan sektor pertambangan adalah X_1 (Konsumsi Rumah tangga) dan X_4 (Investasi.)

3. $Y3 = 2,089 - 0,004 X1 + 0,351 X2 + 0,001 X3 + 0,263 X4 + 0,214 X5 + 0,024 X6$

Perkembangan sektor Industri dipengaruhi oleh X_1 Konsumsi Rumah Tangga, X_2 Pengeluaran Lembaga, X_3 Pengeluaran Pemerintah, X_4 Investasi, X_5 Inventori/Stok dan X_6 Export Neto dimana yang paling dominan adalah X_3 Pengeluaran Pemerintah.

Berdasarkan Persamaan diatas diperoleh banyaknya variabel yang tidak signifikan, sehingga perlu dilakukan uji metode step wise guna membentuk persamaan yang terbaik sebagai berikut :

$$Y3 = 0,634 + 0,858 X1 + 0,011 X6 + 0,045 X4$$

Berdasarkan persamaan diatas yang paling dominan mempengaruhi sektor Industri adalah X_1 (Konsumsi Rumah tangga), X_6 (Export Neto) dan X_4 (Investasi).

4. $Y4 = -3,652 + 3,212 X1 - 1,026 X2 + 0,005 X3 - 0,597 X4 - 0,581 X5 - 0,031 X6$

Pertumbuhan sektor listrik, gas dan air dipengaruhi oleh X_1 Konsumsi Rumah Tangga, X_2 Pengeluaran Lembaga, X_3 Pengeluaran Pemerintah, X_4 Investasi, X_5 Inventori/Stok dan X_6 Export Neto dimana yang paling dominan adalah X_1 Konsumsi Rumah Tangga.

Berdasarkan Persamaan diatas diperoleh banyaknya variabel yang tidak signifikan, sehingga perlu dilakukan uji metode step wise guna membentuk persamaan yang terbaik sebagai berikut :

$$Y4 = 0,821 + 0,785 X1 - 0,043 X2$$

Lebih lanjut tingkat pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih ternyata didominasi oleh pengeluaran sektor X_1 (Konsumsi Rumah Tangga) dan X_2 (Pengeluaran Lembaga).

5. $Y5 = 0,416 - 0,973 X1 + 0,943 X2 - 0,004 X3 + 0,565 X4 + 0,538 X5 - 0,034 X6$

Pertumbuhan sektor pembangunan dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh X_1 Konsumsi Rumah Tangga, X_2 Pengeluaran Lembaga, X_3 Pengeluaran Pemerintah, X_4 Investasi, X_5 Inventori/Stok dan X_6 Export Neto dimana yang paling dominan adalah X_1 Konsumsi Rumah Tangga.

Berdasarkan Persamaan diatas diperoleh banyaknya variabel yang tidak signifikan, sehingga perlu

dilakukan uji metode step wise guna membentuk persamaan yang terbaik sebagai berikut :

$$Y5 = -4,017 + 1,353 X1$$

Lebih lanjut dari persamaan diatas faktor yang mendominasi pertumbuhan sektor pembangunan adalah X_1 (Konsumsi Rumah Tangga).

6. $Y6 = 1,166 - 0,020 X1 + 0,460 X2 + 0,001 X3 + 0,243 X4 + 0,237 X5 + 0,016 X6$

Pertumbuhan sektor perdagangan dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh X_1 Konsumsi Rumah Tangga, X_2 Pengeluaran Lembaga, X_3 Pengeluaran Pemerintah, X_4 Investasi, X_5 Inventori/Stok dan X_6 Export Neto dimana yang paling dominan adalah X_2 Pengeluaran Lembaga.

Berdasarkan Persamaan diatas diperoleh banyaknya variabel yang tidak signifikan, sehingga perlu dilakukan uji metode step wise guna membentuk persamaan yang terbaik sebagai berikut :

$$Y6 = -0,562 + 0,920 X1 + 0,060 X2$$

Berdasarkan persamaan diatas yang mendominasi pertumbuhan sektor perdagangan adalah pengeluaran X_1 (Konsumsi Rumah Tangga) dan X_2 (Pengeluaran Lembaga).

7. $Y7 = 2,038 - 1,705 X1 + 1,214 X2 + 0,787 X4 + 0,716 X5 + 0,046 X6$

Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh X_1 Konsumsi Rumah Tangga, X_2 Pengeluaran Lembaga, X_3 Pengeluaran Pemerintah, X_4 Investasi, X_5 Inventori/Stok dan X_6 Export Neto dimana yang paling dominan adalah X_1 Konsumsi Rumah Tangga.

Berdasarkan Persamaan diatas diperoleh banyaknya variabel yang tidak signifikan, sehingga perlu dilakukan uji metode step wise guna membentuk persamaan yang terbaik sebagai berikut :

$$Y7 = -3,402 + 1,285 X1 + 0,056 X4$$

Berdasarkan persamaan diatas yang mendominasi pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi adalah pengeluaran X_1 (Konsumsi Rumah Tangga) dan X_4 (Investasi).

8. $Y8 = -22,042 + 7,576 X1 - 2,144 X2 - 0,042 X3 - 1,175 X4 - 1,2 X5 - 0,047 X6$

Perkembangan sektor keuangan, perawatan dan jasa dipengaruhi oleh X_1 Konsumsi Rumah Tangga, X_2 Pengeluaran Lembaga, X_3 Pengeluaran Pemerintah, X_4 Investasi, X_5 Inventori/Stok dan X_6 Export Neto dimana yang paling dominan adalah X_1 Konsumsi Rumah Tangga.

Berdasarkan Persamaan diatas diperoleh banyaknya variabel yang tidak signifikan, sehingga perlu dilakukan uji metode step wise guna membentuk persamaan yang terbaik sebagai berikut :

$$Y_8 = -10,575 + 2,320 X_1 - 0,130 X_3$$

Berdasarkan persamaan diatas yang mendominasi pertumbuhan sektor keuangan, perawatan dan jasa di dominasi oleh sektor X_1 (Konsumsi Rumah Tangga) dan X_3 (Pengeluaran Pemerintah).

$$9. Y_9 = -0,489 + 0,18 X_1 + 0,415 X_2 - 0,006 X_3 + 0,232 X_4 + 0,232 X_5 + 0,017 X_6$$

Perkembangan sektor jasa-jasa dipengaruhi oleh X_1 Konsumsi Rumah Tangga, X_2 Pengeluaran Lembaga, X_3 Pengeluaran Pemerintah, X_4 Investasi, X_5 Inventori/Stok dan X_6 Export Neto dimana yang paling dominan adalah X_1 Konsumsi Rumah Tangga.

Berdasarkan Persamaan diatas diperoleh banyaknya variabel yang tidak signifikan, sehingga perlu dilakukan uji metode step wise guna membentuk persamaan yang terbaik sebagai berikut :

$$Y_9 = -2,425 + 1,190 X_1 - 0,011 X_5$$

Dari persamaan diatas perkembangan sektor jasa-jasa di dominasi oleh X_1 (Konsumsi Rumah Tangga) dan X_5 (Inventori/Stok).

Lebih lanjut untuk mengetahui sektor-sektor perekonomian mana yang berpengaruh pada tingkat penyediaan lapangan pekerjaan maka diperoleh model sebagai berikut :

$$Z_1 = -4,139 + 1,248 Y_2 + 0,421 Y_3 + 0,942 Y_4 - 4,071 Y_5 + 1,714 Y_7 - 0,357 Y_8 + 1,733 Y_9$$

Sektor –sektor yang berpengaruh pada penyediaan lapangan pekerjaan adalah Sektor Pertanian (Y1), Pertambangan dan Penggalian (Y2), industri Pengolahan (Y3), Listrik, Gas dan Air Bersih (Y4), Bangunan (Y5), Perdagangan, Hotel dan Restoran (Y6), Pengangkutan dan Komunikasi (Y7), Keuangan, Perawatan Dan Jasa Perusahaan (Y8), Jasa-jasa (Y9) dan yang paling mendominasi adalah sektor Y9 Jasa-jasa. Dari ke sembilan sektor tersebut hanya sektor bangunan dan Keuangan, Perawatan dan Jasa Perusahaan yang memiliki dampak negatif terhadap usaha peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan. Jika dilakukan analisis lebih lanjut maka diketahui bahwa hanya sektor pertambangan dan penggalian yang berperan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten seperti terlihat pada model berikut :

$$Z_1 = 5,042 + 0,298 Y_2$$

Maka dapat dinyatakan bahwa cara cepat untuk meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten adalah dengan memperhatikan dan memberdayakan sektor pertambangan dan penggalian yang ada di wilayah ini.

Sedangkan untuk mengetahui peranan dari sektor-sektor perekonomian terhadap penurunan jumlah penduduk miskin diperoleh model :

$$Z_2 = 28,175 - 1,908 Y_2 - 2,548 Y_3 - 1,699 Y_4 + 6,518 Y_5 - 1,463 Y_7 + 0,26 Y_8$$

$$- 2,562 Y_9$$

Perkembangan ektor –sektor yang berpengaruh pada penurunan tingkat kemiskinan adalah Pertambangan dan Penggalian (Y2), industri Pengolahan (Y3), Listrik, Gas dan Air Bersih (Y4), Pengangkutan dan Komunikasi (Y7), dan Jasa-jasa (Y9). Sedangkan perkembangan pada sektor bangunan dan Keuangan, Perawatan Dan Jasa Perusahaan (Y8), tidak mengakibatkan penurunan pada jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten. Adapun perkembangan sektor yang paling mendominasi penurunan jumlah penduduk miskin adalah adalah sektor Jasa-jasa (Y9). Analisis lebih lanjut menghasilkan model sebagai berikut :

$$Z_2 = 14,548 - 2,112 Y_4 + 0,834 Y_5$$

Jika ditinjau lebih lanjut maka dari 9 sektor yang paling berpengaruh adalah Listrik, Gas dan Air Bersih (Y4) dan Bangunan (Y5). Dari persamaan diatas terlihat bahwa penyediaan listrik, gas dan air bersih berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan masyarakat di Provinsi ini , dimana semakin tinggi tingkat penggunaan listrik, gas dan air bersih maka semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat. Sebaliknya semakin minim penggunaannya maka semakin tinggi tingkat kemiskinan masyarakat.

Sedangkan sektor bangunan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, secara statistik dapat dinyatakan bahwa semakin banyak bangunan yang didirikan di wilayah Provinsi ini makin semakin bertambah jumlah penduduk miskin yang ada di wilayah ini. Hal ini dimungkinkan jika pendirian bangunan dilakukan dengan melakukan pengurusan tanpa memberikan ganti rugi yang layak, sehingga mengakibatkan masyarakat yang berada pada ambang batas kemiskinan menjadi benar-benar miskin karena kehilangan tempat tinggal, karena salah satu indikator kemiskinan adalah ketiadaan tempat tinggal. Disisi lain peningkatan jumlah bangunan hanyalah bagi kelompok keluarga kalangan menengah ke atas, sehingga peruntukan bangunan bagi masyarakat berpendapatan rendah menjadi sangat rendah.

Maka berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Pertumbuhan ekonomi adalah syarat utama dalam meningkatkan penyediaan lapangan pekerjaan, penurunan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. usaha yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Banten dalam membuat kebijakan untuk mendorong tingkat pertumbuhan ekonominya adalah dengan mempertahankan pola konsumsi masyarakatnya yaitu dengan menyediakan kebutuhan konsumsi masyarakatnya seperti kebutuhan makanan, pakaian dan kebutuhan lainnya. Selain itu pemerintah pun harus mampu

mempertahankan daya beli masyarakatnya dengan menjaga tingkat pendapatan masyarakatnya. Karena hal ini berkaitan erat dengan usaha penurunan tingkat kemiskinan masyarakat. Dimana seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut (Siregar, 2007). Mekanisme transmisi pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan salah satunya melalui teori pertumbuhan endogen yaitu pada saat garis kemiskinan menjadi pertimbangan maka inflasi menjadi variabel yang relevan. Laju inflasi akan menggeser garis kemiskinan ke atas. Kombinasi dari pertumbuhan yang lambat dan laju inflasi yang relatif tinggi akan menyebabkan rumah tangga tersebut jauh ke bawah jurang kemiskinan.

- Pertumbuhan ekonomi pun akan efektif dalam mengurangi kemiskinan jika pertumbuhan tersebut merata atau menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin (*growth with equity*). Secara langsung hal ini berarti pertumbuhan ekonomi perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana orang miskin bekerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal ini berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif meredistribusikan manfaat pertumbuhan yang untuk Provinsi Banten didominasi oleh sektor industri pengolahan.
- Perlunya dilakukan pengamatan lebih lanjut pada proses pembangunan yang dilakukan di Provinsi Banten, karena ternyata proses pembangunan yang telah dilakukan tidak mengakibatkan bertambahnya penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan tingkat kemiskinan.
- Penyediaan listrik, gas dan air bersih harus terus diperhatikan karena sektor ini sangat berperan dalam penurunan jumlah penduduk miskin di wilayah ini.
- Sektor Penggalan dan pertambangan pun harus turut diperhatikan perkembangannya karena sektor ini lah yang paling banyak menyediakan lapangan pekerjaan di Provinsi ini walaupun belum berhasil mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Secara umum pengeluaran konsumsi masyarakat, konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi pemerintah terus mengalami peningkatan hal ini berdampak positif pada usaha peningkatan PDRB Provinsi Banten yang laju perubahannya terus mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2000-2010.

Laju penyediaan lapangan pekerjaan terus mengalami peningkatan, laju perubahan jumlah penduduk miskin pun terus mengalami penurunan, tetapi suatu hal yang menarik, pada tahun 2003 dan 2006 di Provinsi Banten terjadi penurunan jumlah penyediaan

lapangan pekerjaan yang dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk miskin. Bahkan pada tahun 2006, kondisi ini mencapai titik tertinggi. Tetapi secara umum laju perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten relatif stabil.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Laju perubahan PDRB di Propinsi Banten terus mengalami peningkatan, hal ini terutama didukung oleh perubahan pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nirlaba dan konsumsi pemerintah yang terus mengalami peningkatan. Dari keenam variabel bebas yaitu konsumsi rumah tangga, lembaga nirlaba, pengeluaran pemerintah, investasi, *inventory stock* dan ekspor netto, variabel yang paling berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial adalah variabel konsumsi. Variabel ini merupakan variabel yang paling dominan terhadap usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.
2. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap lapangan pekerjaan, dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi maka sektor ekonomi akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Pertumbuhan ekonomi PDRB Banten mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan mengurangi kemiskinan.
4. Lapangan pekerjaan dan tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, semakin terciptanya lapangan pekerjaan dan semakin berkurangnya tingkat kemiskinan, maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.
5. Terdapat pengaruh pertumbuhan sektoral yang positif dan signifikan terhadap lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten memiliki pengaruh positif terhadap usaha penyediaan lapangan pekerjaan, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten maka akan semakin tinggi pula tingkat penyediaan lapangan pekerjaan.
6. Terdapat pengaruh pertumbuhan sektoral yang positif dan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi akan memacu tumbuhnya penyediaan lapangan pekerjaan yang dapat menyerap tenaga penduduk dan semakin rendah tingkat kemiskinan, maka akan mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Laju perubahan penyediaan lapangan pekerjaan dan

tingkat kesejahteraan masyarakat terus mengalami kenaikan, sedangkan laju perubahan jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan di Provinsi Banten.

7. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki pengaruh yang dominan terhadap usaha peningkatan penyediaan lapangan pekerjaan di propinsi Banten.
8. Penyediaan listrik, gas, dan air bersih adalah faktor pendorong penurunan jumlah penduduk miskin di Propinsi Banten.

SARAN

1. Diharapkan pemerintah lebih fokus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, dimana keenam Variabel tersebut perlu dikembangkan secara optimal. Adapun yang menjadi prioritas utama adalah meningkatkan konsumsi masyarakat guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan untuk mempertahankan konsumsi masyarakatnya pemerintah harus mampu mempertahankan daya beli masyarakat. Usaha mempertahankan daya beli masyarakatnya ini tidak terlepas dengan usaha penyediaan lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Sektor yang paling dominan dalam menggerakkan perekonomian di propinsi Banten adalah sektor industri pengolahan, untuk itu dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dalam mendukung perkembangannya diantaranya dengan menyediakan sarana dan prasarana pendukung sektor ini, sehingga dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi di Propinsi Banten
3. Penyediaan lapangan pekerjaan harus dikaitkan dengan tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan yang ada akan mampu menjadikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan

DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, Rochman, 2008. Struktur dan Agensi dalam studi kemiskinan, SMERU, No, 27 Sep-Dec.
- Adelman, I. and S. Robinson. 1978. Intercommodity Price Transmittal: Analysis of Food Markets in Ghana. Oxford Buletin of Economics and Statistics, 55(5): 43-64.
- Aktar, Ismail dan Latif Ozturk, 2009, Can unemployment be cured bay economic growth and foreign direct investment in Turkey, Jurnal of Finance & economic, Internal Research.

hidupnya, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

4. Perlunya perhatian lebih dari pemerintah pada sektor-sektor lain di luar industri pengolahan sehingga perkembangan di seluruh sektor dapat terjadi.
5. Kondisi yang terjadi di Propinsi Banten adalah akibat peningkatan industri terjadi peningkatan impor barang modal. Hal ini harus mendapat perhatian karena jika terus berlanjut akan dapat menyebabkan masalah keuangan di Propinsi ini akibat adanya ketergantungan impor barang modal yang mendorong terjadinya inflasi.
6. Perlunya dikembangkan industri yang berbasis pertanian, karena jumlah petani yang ada di propinsi ini relatif tinggi, dan pada sektor inilah jumlah penduduk miskin berada sehingga dengan adanya perhatian dari pemerintah pada perkembangan sektor pertanian, maka usaha pengentasan kemiskinan dapat benar-benar tercapai.
7. Sektor penggalian dan pertambangan adalah sektor yang memberikan peranan terbesar dalam penyediaan lapangan pekerjaan di Propinsi Banten, maka diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung usaha pengembangan sektor tersebut.
8. Pemerintah dirasa perlu untuk memahami kondisi yang terjadi pada tahun 2003 dan 2006, dimana pada saat itu terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang dibarengi dengan menurunnya penyediaan lapangan pekerjaan, dengan maksud kondisi ini tidak terulang dimasa yang akan datang, dan harus senantiasa memperhatikan pasokan listrik, gas, dan air minum bagi masyarakat, karena sektor ini lah yang paling berperan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Propinsi Banten.

Ala, Andre Bayo, *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*, Liberty, Yogyakarta, 1981.

Alghofari, 2007. Analisis tingkat Pengangguran di Indonesia selama tahun 1980 -2007, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. BPFE Yogyakarta.

_____. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Lima, penerbit STIM YKPN Yogyakarta, Cetakan pertama.

- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten *Indikator Ekonomi*. Berbagai Tahun Penerbitan (2000 – 2010)
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten *Statistik Tahunan*. Berbagai Tahun Penerbitan (2000 – 2010)
- Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia*. Berbagai Edisi Tahun Penerbitan (2000 – 2010)
- Bank Indonesia, *Laporan Tahunan*. Berbagai Tahun Penerbitan (2000 – 2010)
- Bappenas. 2002. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan: Sebuah Gagasan. Bappenas. Jakarta.
- Blanchard, Olivier. 2009. *Macroeconomics* Updated Edition, Penerbit Prenticehall Singapore
- Dornbusch Rudiger, Stanley Fischer, Richard Startz. 2008. *Makroekonomi*, edisi 10 International Edition. The McGraw-Hill Companies.
-
- 2008 *Makroekonomi*, edisi 10 Edisi Bahasa Indonesia penerbit PT Gelobal Edukasi.
- Dumairy. 2004. *Perekonomian Indonesia*, Cetakan Kelima, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Dusenberry, J.S., 1949, *Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Fillaili, Rizki, 2008. Memahami Jalan keluar dari Kemiskinan : Kapasitas Agensi dan mobilitas Kesejahteraan, SMERU. No. 27 Sep-Dec.
- Gujarati, Damodar, 1998, *Ekonometrika Dasar*, Alih Bahasa, Sumarno Zain, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Hakim, Abdul. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, penerbit Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Cetakan ketiga.
- <http://kaharscahyono.wordpress.com/2010/10/23/jumlah-pengangguran-di-banten-tertinggi-se-indonesia/> (Di akses 9 Juni 2012)
- <http://mdgs-dev.bps.go.id/main.php?link=home> (Di akses 6 Juni 2012)
- <http://www.wartatangerang.com/banten/40-berita/3870-rendah-minat-generasi-muda-banten-untuk-berwirausaha.html> (Di akses 3 Juni 2012)
- Hamzah, Ardi, 2010. Analysis the Revenue and Expense on economic growth, poverty and Unemployment, Universitas Madura.
- Hodge, Duncan, 2009. Growth, employment, and unemployment, working paper number 119. University of South africa.
- Kartasasmita, Ginandjar. 2006. *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pustaka CIDESINDO Jakarta.
- Keynes, John Maynard. 1984 : a personal biography of the man who revolutionized capitalism and the way we live; ; Hession, Charles H.; New York : Macmillan ; London : Collier Macmillan, Ekonomi (Filsafat dan Teori Ekonomi)
- Koutsoyiannis, A. 1977. *Theory of Econometrics*. Harper and Row Publisher Inc, New York.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi*. Edisi Enam. Harvard University. Erlangga.
- _____. 2009. *Makroekonomi*. Edisi Internasional Universitas Harvard.
- Nicholson, 1992 *Ekonomi Makro*, Harvad University, Erlangga, Jakarta
- Nopirin, 2011, *Ekonomi Internasional*, BPFE, Yogyakarta.
- Organisasi Perburuhan Internasional *Petunjuk Satu Pengelolaan - Pengelolaan Organisasi Pengusaha* Jakarta, Kantor Perburuhan Internasional, 2006 Cetakan Pertama, Jakarta 2006
- Ravallion, M. 2006. *Poverty Comparisons*. World Bank.
- Reksoprayitno, Soediyono, 2000 *Ekonomi Makro (Pengantar Analisis Pendapatan Nasional)*, Edisi Kelima. Cetakan Kedua, Yogyakarta: Liberty.
- Rioja, Felix K, 2001. Growth, welfare & public infrastruktur, a general equilibrium. *Analysis of Latin American Economies*, Journal of Economic Development, Volume 26, Number 2.
- RPJMD, 2000 – 2011 Provinsi Banten.
- Sajogyo. 1977. "Golongan miskin dan partisipasi dalam pembangunan desa", *Prisma*, 3: 10-17.
- Seminar. 1993. *Peningkatan Kesejahteraan Umat Melalui Pemerantasan Kemiskinan. Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan P3PK-UGM dan Universitas Marcubwana*. Jakarta 18-20 Juni.
- Siregar, Hermanto, 2009, *Makro dan Mikro Pembangunan*, Kumpulan Jurnal dan Makalah, IPB Press, Bogor.
- Sitepu, Rasidin dan Bonar M. Sinaga, 2009. Dampak Investasi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia, IPB Press. Bogor.
- Smith Stephen C, Tondoro Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi Kesembilan, jilid 1, Erlangga Jakarta.
- Soemardjan, Selo. 1980. "Kemiskinan Struktural dan Pembangunan: Pengantar", dalam Alfian, et.al. (eds) *Kemiskinan Struktural*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

- Sutawijaya, Adrian, 2007. Pengaruh ekspor dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1980-2006, FE, Univ. Terbuka. Jakarta.
- Todaro M.P. dan Stephen C. Smith 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- UNICEF — WHO UNESCO. The Facts for Life. 1989.
- Widodo, Adi, 2011. *Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah Di sektor pendidikan dan kesehatan Terhadap pengentasan kemiskinan melalui Peningkatan pembangunan manusia di Provinsi jawa tengah. Jurnal Dinamika ekonomi pembangunan.* 18, 25-42
- Wirasasmita, Yuyun, "Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan", Analisis Ekonomi Jawa Barat, Unpad Press, 2003.
- www.unrisd.org United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD) Palais des Nations 1211 Geneva 10 Switzerland